

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses upaya meningkatkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu yang menjadi indikator penting dalam mengetahui keberhasilan perekonomian suatu negara serta turut menentukan arah pembangunan untuk kedepan. Salah satu indikator penting dalam pembangunan ekonomi yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu (Simanjutak & Mukhlis, 2012). Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah makro ekonomi yang akan selalu dihadapi suatu negara. Masalah pertumbuhan ekonomi yang dihadapi negara-negara berkembang, terutama yang masih rendah taraf pembangunan dan kemakmurannya. Sedangkan menurut Kuznets (dalam Sukirno, 2006), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya.

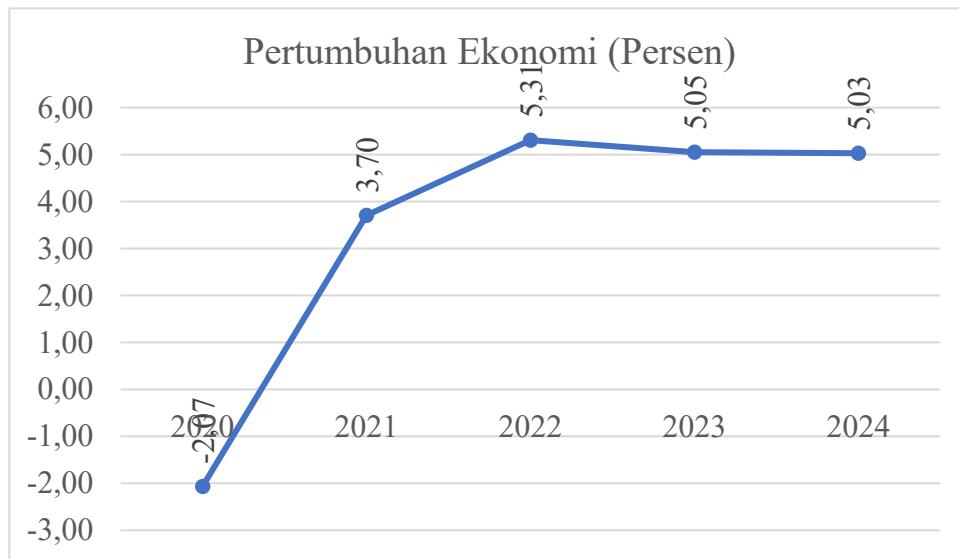
Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan tersebut dapat dicerminkan dari peningkatan ekonomi yang menunjukkan adanya peningkatan pendapatan. Sehingga sering dijadikan sebagai tolak ukur dari sebuah keberhasilan pemerintah dalam menaikkan tingkat kehidupan masyarakat di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil dari tahun ke tahun berarti kesejahteraan ekonomi meningkat, sedangkan pertumbuhan ekonomi dengan nilai negatif berarti tingkat kesejahteraan disuatu negara juga menurun. Tinggi rendah laju pertumbuhan

ekonomi di suatu negara menunjukkan tingkat perubahan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah (Rahardjo, 2013). Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus dalam sistem perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan barang dan jasa bagi seluruh masyarakat di suatu negara atau wilayah, sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh (Putri & Nailufar, 2022)

Adanya keseimbangan dalam suatu perekonomian merupakan salah satu target dalam rangka peningkatan perekonomian suatu negara. Negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka akan mampu memberikan efek yang tinggi terhadap bidang-bidang yang lain ketika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi maka pendapatan nasional suatu negara akan terdongkrak naik sehingga bisa dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur perekonomian. Suatu perekonomian dikatakan mengalami perubahan dan berkembangan apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya. Oleh sebab itu negara selalu menetapkan target tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam perencanaan dan tujuan pembangunan negaranya.

Menurut Sukirno (2016) mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional, mengukur semua nilai akhir barang dan jasa yang

diproduksikan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu. Berikut Gambar 1.1 perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.



Gambar 1.1
Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Berdasarkan pada Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami fluktuasi yang dominan meningkat dari tahun 2020-2024, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar -2,07 persen dimana angka ini menunjukkan angka yang sangat rendah pada lima tahun terakhir. Rendahnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Pada tahun 2020 Indonesia mengalami pandemi disebabkan COVID-19 yang menjadi faktor utama terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020, pada tahun 2021 meskipun pandemi masih berlangsung Indonesia mulai mengalami pemulihan ekonomi sebesar 3,70 persen. Pemulihan ekonomi berlanjut pada tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih positif dibandingkan tahun sebelumnya sebesar

5,31 persen. Menurut Kemenko (2023) pertumbuhan ekonomi meningkat dikarenakan ditopang oleh hampir seluruh komponen produksi domestik bruto yaitu konsumsi rumah tangga, ekspor dan investasi. Akan tetapi pada tahun 2023 realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05 persen melambat dibandingkan tahun 2022. Hal ini sejalan dengan perkiraan akibat perlambatan ekonomi global dan aktivitas domestik yang terdampak inflasi tinggi (Sipayung, 2024). Pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun tipis dari 5,05% pada 2023 menjadi 5,03 persen pada 2024 terutama karena kontribusi negatif dari net ekspor akibat impor yang tumbuh lebih cepat dari ekspor, serta melambatnya sektor pertanian dan industri pengolahan.

Pemerintah terus berupaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi guna mencapai target yang telah ditetapkan, sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menjaga momentum tersebut, berbagai kebijakan strategis terus dijalankan dan dioptimalkan, mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga pemberian stimulus khusus selama bulan Ramadan dan Idul fitri. Langkah-langkah ini dilakukan agar sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% yang tercantum dalam APBN tahun 2025 dapat direalisasikan dengan baik (Limanseto, 2025). Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pemerintah dapat memperkuat struktur ekonomi nasional dengan membangun infrastruktur ekonomi nasional yang memadai dan mendorong investasi. Selain itu dunia usaha perlu meninggalkan kebiasaan mengekspor bahan mentah dan mulai mengelolah bahan baku menjadi barang jadi bernilai tambah tinggi serta mampu memproduksi barang modal. Langkah ini akan meningkatkan

daya saing industri dalam negeri, memperkuat ekspor, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan (Sasongko, 2020)

Dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diwujudkan dengan adanya sumber penerimaan negara. Salah satu sumber utama adalah penerimaan tersebut yaitu dari pajak, baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dan sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pentingnya peran pajak membuat Direktorat Jendral Pajak melakukan berbagai cara untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Dengan demikian, tanpa penerimaan pajak, Sebagian besar kegiatan Negara seperti pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan akan sulit untuk dilaksanakan (Nadia & Kartika, 2020)

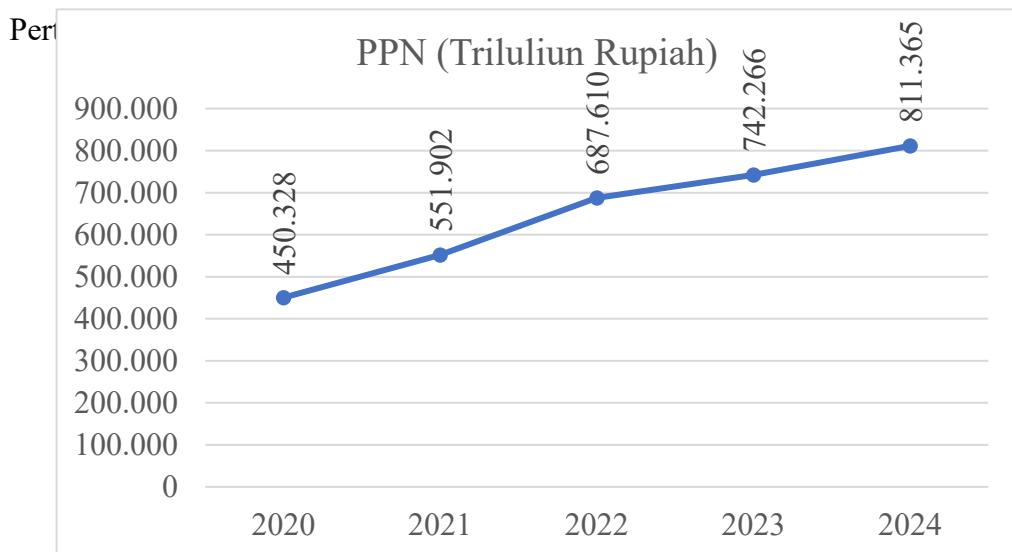
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa. Pajak ini dikenakan atas pertambahan nilai dari suatu barang atau jasa di setiap rantai transaksi, mulai dari produsen hingga konsumen akhir. Di Indonesia, PPN diatur berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah, yang dikemudian mengalami berbagai perubahan sesuai dengan kebutuhan. PPN memiliki karakteristik sebagai pajak objektif, artinya pengenaan pajak tidak memperhitungkan kondisi subjek yang dikenai pajak, melainkan didasarkan pada nilai transaksi yang terjadi.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dibanding pajak lainnya karena dikenakan pada hampir

semua transaksi barang dan jasa, sehingga setiap aktivitas konsumsi masyarakat langsung memengaruhi penerimaan pajak ini. Konsumsi rumah tangga, sebagai komponen terbesar PDB, membuat PPN memiliki korelasi yang kuat dengan pergerakan ekonomi. Selain itu, penerimaan PPN yang besar memungkinkan pemerintah meningkatkan belanja publik dan investasi, yang selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung. Dengan demikian, PPN bukan hanya sumber penerimaan negara yang signifikan, tetapi juga instrumen penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan instrumen fiskal yang digunakan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus mengatur aktivitas ekonomi. Sebagai pajak tidak langsung, PPN dibebankan kepada konsumen akhir, sehingga perubahan tarif PPN dapat memengaruhi pola belanja masyarakat. Kenaikan tarif PPN berpotensi menekan konsumsi, sedangkan penurunan tarif dapat mendorong peningkatan permintaan barang dan jasa. Dengan demikian, kebijakan PPN memiliki implikasi penting terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

Pajak pertambahan nilai saat ini memiliki tarif yang bervariasi tergantung pada jenis barang atau jasa yang dikenakan pajak. Beberapa barang atau jasa dikecualikan dari pajak ini atau dikenakan tarif yang lebih rendah untuk meringankan beban konsumen. Selain itu, PPN juga membantu mendorong transparansi dan kepatuhan pajak di seluruh rantai produksi dan distribusi barang dan jasa. Dengan penerapan PPN, pemerintah dapat menghimpun dana yang dibutuhkan untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Meskipun terdapat pro dan kontra terkait kebijakan PPN, tidak dapat dipungkiri

bahwa pajak ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas perekonomian negara (Ajuna, 2024). Berikut Gambar 1.2 perkembangan Pajak



Gambar 1.2
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Berdasarkan Gambar 1.2 Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi yang dominan meningkat. Pada tahun 2020 berada di posisi terendah yaitu 450,3 triliun rupiah rendahnya PPN pada tahun tersebut disebabkan karena pandemi Covid-19 yang berakibat menurunkan penerimaan negara karena melambatnya perekonomian masyarakat. Hal ini menyebabkan konsumsi barang dan jasa juga ikut menurun, yang berdampak pada penerimaan PPN sehingga pemerintah melakukan pembatasan mobilitas dan perekonomian masyarakat mengalami penurunan. Namun pada tahun 2021 Penerimaan PPN kembali meningkat menjadi 551,9 triliun rupiah bahkan berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2021 sebesar 546,1 triliun rupiah. Ini menjadi

pencapaian penting, karena untuk pertama kalinya dalam 12 tahun target penerimaan pajak berhasil tercapai (Komwas Perpajakan 2021). Peningkatan ini didorong oleh beberapa faktor, seperti vaksinansi yang semakin luas, aktivitas ekonomi yang mulai pulih, serta meningkatnya kegiatan ekspor dan impor. Pada tahun 2022 penerimaan PPN kembali menunjukkan tren positif mencapai 687,6 triliun rupiah, salah satu faktor yang mendorong kenaikan ini adalah tarif PPN yang naik menjadi 11 persen yang secara signifikan menambah pemasukan negara dimasa pemulihan pasca pandemi. Pada tahun 2023 PPN meningkat sebesar 742,2 triliun rupiah, hal ini disebabkan oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan komsumsi masyarakat seperti pertumbuhan industri, perdagangan, dan sektor jasa, secara langsung mendorong peningkatan jumlah transaksi yang dikenakan PPN. Fenomena ini menunjukkan bahwa PPN (dan PPnBM) semakin menjadi tulang punggung penerimaan pajak, terutama di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kontribusi kuat dari pajak konsumsi ini mencerminkan bahwa konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekonomi domestik memberi sumbangan besar terhadap penerimaan negara, berbeda dengan PPh yang lebih tergantung pada pendapatan dan profit usaha. Selain itu, penerimaan total pajak nasional sempat terpukul pada 2020 akibat pandemi, tetapi pada 2021 hingga 2023 penerimaan pajak kembali tumbuh signifikan. Penerimaan negara dari PPN meningkat menjadi 811,365 triliun pada tahun 2024 karena dipengaruhi oleh naiknya konsumsi masyarakat. Selain itu, perluasan basis pajak melalui digitalisasi dan pengawasan yang lebih ketat turut meningkatkan kepatuhan pajak.

Peningkatan signifikan pada PPN adalah efek langsung dari kebijakan fiskal pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara. Sejak April 2022, tarif PPN telah dinaikkan dari 10% menjadi 11%, dan kenaikan ini sepenuhnya tercermin dalam penerimaan pajak sepanjang tahun 2023. Artinya, setiap transaksi yang dikenakan PPN secara otomatis menghasilkan pungutan yang lebih besar, berkontribusi pada peningkatan penerimaan kas negara, terlepas dari laju pertumbuhan ekonomi riil (Undang-Undang, 2021)

Pajak Pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada barang dan jasa, dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk diperhatikan meskipun menaikkan tarif PPN dapat menambah pendapatan negara, hal ini dapat juga memperlambat pertumbuhan ekonomi karena harga barang dan jasa menjadi lebih mahal, sehingga daya beli masyarakat menurun. Menurut (Suryani, 2019), meskipun PPN membantu meningkatkan pendapatan nasional, jika tidak diatur dengan baik, kenaikan PPN bisa berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga didukung oleh penelitian, (Julito & Ramadani, 2024) yang menyatakan bahwa pemerintah perlu berhati-hati dalam menentukan tarif PPN agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

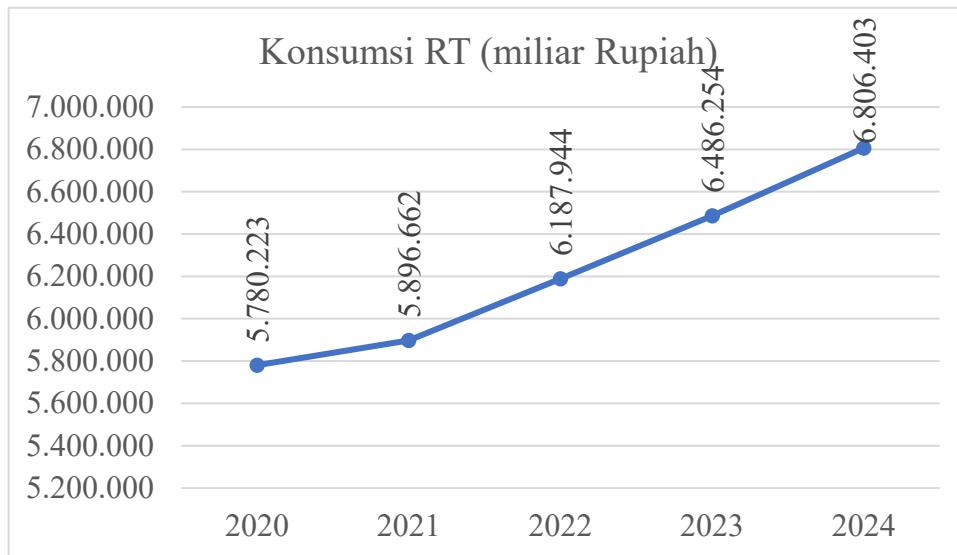
Dengan adanya PPN, transparansi dalam sistem perpajakan juga dapat ditingkatkan sehingga dapat meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan dan penghindaran pajak. Selama bertahun-tahun, PPN telah mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian untuk memastikan efektivitasnya dalam menghasilkan pendapatan dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Beberapa perubahan tersebut antara lain penyesuaian tarif pajak untuk mencerminkan

perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal yang diperbarui. Selain itu, pemerintah terus mengevaluasi sistem PPN untuk memastikan pajak ini tetap efisien dan adil bagi semua pihak. Dengan PPN yang baik, diharapkan dapat memberikan dorongan yang signifikan bagi pembangunan ekonomi Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nirmalasari *et al.*, 2024).

Selain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Konsumsi rumah tangga juga memberikan pemasukan terhadap pendapatan nasional. Konsumsi rumah tangga juga mempunyai dampak dalam menentukan fluktuasi kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. Sementara itu dalam jangka panjang pola konsumsi masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi (Viki *et al.*, 2022)

Konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga atau masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu periode tertentu guna memenuhi kebutuhan hidup. Aktivitas konsumsi ini mencerminkan tingkat permintaan masyarakat terhadap berbagai produk, baik barang konsumsi maupun jasa layanan. Semakin tinggi tingkat konsumsi rumah tangga, maka semakin besar pula perputaran uang di dalam perekonomian (Roosmanita & Marbun, 2022). Konsumsi rumah tangga memiliki peranan strategis dalam menggerakkan aktivitas ekonomi karena menjadi sumber utama permintaan terhadap barang dan jasa. Tinggi rendahnya tingkat konsumsi mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat serta stabilitas perekonomian secara umum. Perubahan konsumsi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pendapatan, tingkat harga, dan kebijakan pemerintah. Untuk melihat bagaimana perkembangan konsumsi rumah tangga dari waktu ke waktu, berikut disajikan grafik yang

menggambarkan data konsumsi rumah tangga di Indonesia. Berikut Gambar 1.3 perkembangan Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia.



**Gambar 1.3
Konsumsi Rumah Tangga tahun 2020-2024**

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Berdasarkan pada gambar 1.3 Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai 2024 kecuali pada tahun 2020. Terjadinya penurunan konsumsi rumah tangga pada tahun 2020 sebesar 5.780 miliar rupiah dari tahun sebelumnya disebabkan oleh beberapa faktor seperti Covid-19, penurunan daya beli masyarakat dan ketidakpastian ekonomi. Pada tahun 2021, konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 5,896 miliar rupiah. Hal ini disebabkan karena penjualan eceran di Indonesia meningkat seiring dengan naiknya permintaan masyarakat terhadap berbagai barang konsumsi. Sementara itu, konsumsi rumah tangga pada tahun 2022 meningkat sebesar 6,187 miliar rupiah pemulihan ekonomi pasca pandemi, yang membuat masyarakat mulai kembali bekerja dan pendapatan

rumah tangga meningkat. Selain itu, optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi mendorong mereka lebih berani berbelanja. Pada tahun 2023 konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 6,486 miliar rupiah, salah satu faktor yang mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga yaitu karena inflasi yang terkendali menjaga stabilitas harga, sehingga daya beli masyarakat tetap kuat dan mereka lebih percaya diri untuk berbelanja. Selain itu, pulihnya sektor pariwisata menjadi faktor penting yang mendongkrak konsumsi rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga Indonesia meningkat menjadi 6.806 triliun pada tahun 2024 karena didorong oleh meningkatnya pendapatan masyarakat, membaiknya mobilitas pasca pandemi, serta dorongan belanja menjelang Pemilu 2024 yang menggerakkan sektor jasa dan informal. Selain itu, bantuan sosial pemerintah dan terkendalinya inflasi turut memperkuat daya beli rumah tangga.

Konsumsi rumah tangga memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tinggi meningkatkan permintaan barang dan jasa, yang kemudian mendorong produksi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Hal ini akan mendorong peningkatan produksi oleh sektor usaha untuk memenuhi permintaan pasar. Peningkatan produksi selanjutnya membuka lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menciptakan siklus ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, konsumsi rumah tangga memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah pun sering menjadikan konsumsi rumah tangga sebagai indikator utama dalam menilai kondisi ekonomi suatu negara. Ketika konsumsi

meningkat, hal ini menjadi sinyal positif bahwa daya beli masyarakat semakin meningkat dan ekonomi berada dalam kondisi yang stabil atau tumbuh. Hal ini sejalan dengan penelitian Rohim *et al* (2023) berdasarkan hasil penelitiannya disimpulkan bahwa konsumsi rumah tangga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi tenggara.

Sejauh ini ada beberapa variabel yang berkaitan dengan “pengaruh PPN dan konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia” seperti penelitian yang dilakukan oleh Kusdianto (2022) menunjukkan bahwa PPN terhadap pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sudirman, (2018), menunjukkan hasil bahwa konsumsi rumah tangga memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian penelitian ini memiliki perbedaan rentan waktu pada penelitian Kusdianto dari tahun 2012-2022 sedangkan penelitian ini 1991-2024, persamaan dari penelitian ini berada di Indonesia, persamaan dari penelitian Sudirman menggunakan variabel konsumsi rumah tangga, perbedaanya penelitian Sudirman 2005-2015 sedangkan penelitian ini 1991-2024. Penelitian ini memiliki kebaruan dengan menggabungkan PPN dan konsumsi rumah tangga secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi, menggunakan periode data lebih panjang yaitu dari tahun 1991–2024, serta relevan dengan kondisi ekonomi terbaru pascapandemi dan perubahan tarif PPN, sehingga memberikan temuan yang lebih komprehensif dibanding penelitian sebelumnya.

Ada beberapa penelitian yang membahas pengaruh PPN dan konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi terdapat beberapa urgensi yang perlu diisi, penelitian sebelumnya sering kali menggunakan data agregat

regional atau daerah sehingga peneliti ingin menggunakan data agregat nasional. Penelitian ini akan mengeksplorasi interaksi antara ppn dan konsumsi rumah tangga, serta bagaimana interaksi ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Banyak penelitian sebelumnya yang menganalisa secara terpisah, sehingga tidak memberikan gambaran yang utuh tentang hubungan yang kompleks antara keempat variabel tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut tentang **“Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Bagaimana pengaruh Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Bagaimana pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah di jelaskan diatas maka dari itu tujuan yang ingin dicapai dengan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

2. Mengetahui pengaruh Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan pemahaman mengenai peran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan konsumsi rumah tangga dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi, khususnya di Indonesia.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi dan bahan perbandingan dalam kajian yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan, konsumsi rumah tangga, dan pertumbuhan ekonomi, serta sebagai dasar pengembangan penelitian dengan variabel atau metode yang berbeda.
3. Bagi pemerintah penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan perpajakan dan kebijakan ekonomi makro, khususnya terkait optimalisasi penerimaan PPN dan penguatan daya beli masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis penelitian ini akan menambah wawasan dan pemahaman baru mengenai pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi, serta sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana di Universitas Malikussaleh.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi atau bahan masukan dalam upaya memahami dan mengevaluasi peran PPN dan konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan ekonomi yang lebih efektif.